

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Banyak hal yang membuat Indonesia harus juga memfokuskan kerja sama Indonesia dengan Negara lain. Secara harfiah Indonesia punya hubungan yang baik dengan China. Indonesia tidak bisa berdiri di atas satu kaki sendiri, dengan kata lain Indonesia masih mengandalkan negara lain. Indonesia harus berdiri di dua kaki. Apakah itu kekuatan global ataupun kekuatan kita di dalam ASEAN. Pertimbangan Menteri Pertahanan Indonesia Pak Ryamizard adalah pertimbangan negara dan bukan kepentingan pribadi, karena ini merujuk pada kebijakan luar negeri Indonesia yang merupakan diplomasi Indonesia. Diplomasi internasional itu harus berjalan sesuai dengan rezim yang berlaku. Rezim Indonesia sekarang adalah rezimnya Jokowi. Indonesia banyak mempunyai kerja sama dengan China. Dimana kebijakan luar negeri Jokowi dengan ide poros maritim merupakan bisikan dari sejumlah orang yang menjadi bagian dari kesuksesan Jokowi memimpin Indonesia. Pengaruh ideologis maksudnya adalah partai politik yang menaungi Jokowi, peran ketua partai, peran ketua fraksi di DPR, kader partai serta peran pengalaman historis, para akademis, praktisi dan TNI. Kerja sama pertahanan Indonesia dengan China apabila secara bilateral Indonesia adalah salah satu mitra strategis China, begitu pula dengan China, Indonesia adalah mitra strategis China. Akan tetapi Indonesia punya standar-standar yang sama dengan negara-negara lain. Hampir keseluruhan *Defence Cooperation Agreement* (DCA) itu mengikat karena ketika kembali ke negara masing-masing harus di ratifikasi oleh Parlemen. Setelah itu baru di sahkan menjadi Undang-Undang.

Peningkatan kerja sama Indonesia dalam bidang teknologi industri, rudal, roket, peluru kendali, *propeller* (baling-baling untuk menjalankan kapal ataupun pesawat terbang), Indonesia mempercayakan proses *Transfer Of Technology* (ToT), pembelian rudal-rudal yang sudah ditandatangani bahkan banyak tawaran teknologi-teknologi China yang ingin diberikan kepada Indonesia. Kapal-kapal Indonesia sudah punya kelengkapan sebagian dengan rudal c705 dan beberapa jenis rudal lainnya. Indonesia butuh teknologi China dan Indonesia butuh untuk meningkatkan kerja samanya dengan China. Latihan - latihan seperti Mabes TNI dengan China, Indonesia punya *navy to navy talk*, *army to army talk*, *airman to airman talk* juga punya akan tetapi belum *intensif* namun sudah berjalan secara *parsial*. *Military to military* Indonesia China itu

sudah berjalan secara *parsial*. Kemudian Indonesia juga *changing officer* setiap tahun dengan China. Indonesia juga mengirimkan siswa – siswa Tentara Nasional Indonesia, contohnya seperti SESKO TNI, Lemhanas juga mengirimkan personilnya dan ini berlaku *resiprokal* (bersifat saling berbalasan).

Sejauh ini China lebih banyak menerima dari pada mengirimkan untuk personil, akan tetapi Indonesia lebih banyak membeli peralatan- peralatan secara teknologi seperti IT, China mempunyai keunggulan dalam bidang itu dan mereka tidak keberatan untuk *transfer* ke Indonesia. Akan tetapi perlu diingat dengan istilah “tidak ada makan siang gratis”. Keinginan-keinginan China itu sepenuhnya juga berpengaruh dengan bagaimana politik yang diinginkan oleh China itu bisa dibantu oleh Indonesia khususnya yang berkaitan dengan COC (*Code of Conduct*) karena Indonesia sudah dalam proses *framework* yang sudah di tandatangani saat ini. Namun itu adalah sebuah kemajuan ASEAN untuk melakukan satu *agreement* dengan China bagaimana bertingkah laku/ bertata laku di Laut China Selatan itulah yang diinginkan oleh China di Laut China Selatan.

Indonesia adalah negara terbesar di ASEAN dan ASEAN sangat di pengaruhi oleh keinginan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri Indonesia punya peran yang cukup penting di ASEAN. Mau tidak mau Indonesia juga harus punya hubungan yang baik dengan China. Hubungan baik memang bukan berarti Indonesia tidak mempunyai masalah dengan China. Itulah yang mendasari kenapa kita harus menjalin kerja sama militer dengan China. Bahwa ada kepentingan China terhadap Indonesia, begitu pula dengan Indonesia punya kepentingan terhadap China. Seperti istilah “tidak ada teman yang abadi yang ada hanyalah kepentingan”.

China mengakui bahwa *traditional fishing right* itu milik China. China mengakui *sovereignty* Indonesia terhadap Natuna, tetapi China juga mengklaim mempunyai *traditional fishing ground*. China mempunyai kepentingan di Laut China Selatan seperti gas alam, minyak bumi, tambang yang demikian besar di Laut China Selatan yang sampai sekarang belum dieksplorasi. Semua kepentingan itu terletak pada energi.

Ekonomi yang terus berkembang akan dilindungi oleh kelengkapan militer dengan baik pula. TNI memperkuat apa yang diperlukan dalam mekanisme sistem pertahanan di Kepulauan Natuna. Sama dengan China yang juga memperkuat apa yang diperlukan dalam mekanisme sistem pertahanan. Secara domestik Indonesia sudah melakukan

dengan baik. Agar pertahanan suatu negara kuat, ekonominya dulu yang harus kuat. Agar pertahanan Indonesia kuat, ekonominya dulu yang harus diperkuat. Indonesia melakukan penebalan pertahanan di Natuna, sekarang landas pacu diperbesar untuk angkut personil. Pangkalan Angkatan Laut di Natuna yang tadinya hanya bisa satu atau dua untuk kapal sandar, sekarang sudah bisa 3-4 kapal sandar. Tadinya sebelum adanya konflik di Natuna tidak ada Brigade, Marinir, Paskhas, dan sekarang sudah ada. Secara strategis Indonesia menyampaikan pesan.

Ketika China *coast guard*nya dengan nelayan– nelayannya datang ke perairan Indonesia kemudian Presiden Indonesia Jokowi langsung berkunjung ke China. Standar *Coast Guard* China ternyata dilengkapi dengan senjata. Pada tahun 2015 Presiden Indonesia Joko Widodo mendatangi China dan meyakinkan bahwa Xin ji Ping mengakui adanya kedaulatan Indonesia terhadap Natuna dan China pun mengakui itu. Kalau Indonesia merasa China sebagai ancaman, Indonesia merangkul China saja sebagai teman, supaya ancaman itu bisa menjadi alternatif. Apabila Indonesia diamankan saja selamanya malah bisa jadi ancaman untuk Indonesia. Indonesia merangkul China sebagai teman berarti akan menjadi alternatif apakah itu ancaman apakah itu teman. Contoh kasus China ingin memberi radar di Selat Sunda dengan cuma–cuma, Indonesia berani untuk mengatakan tidak dan menolak. Karna Indonesia tau China ingin itu dimiliki oleh tentara Indonesia. Ternyata China ingin semua kapal Amerika Serikat yang melintas di Selat Sunda bisa dipantau oleh China.

Kerja sama yang dilakukan Indonesia dan China semuanya *on going*. Korea selatan memberi teknologi kapal selam sepenuhnya untuk Indonesia. Tetapi itu baru bisa beroperasi 5 sampai 7 tahun ke depan karna masih perlu Indonesia pelajari. Sama halnya dengan personil Indonesia yang masih belajar di China untuk mempelajari teknologi-teknologi dari China. Sehingga setelah pulang dari China Indonesia harus menyiapkan infrastrukturnya, apabila infrastrukturnya sudah siap, Indonesia harus menyiapkan pabriknya. Memang China memberinya juga berangsur-angsur sambil menunggu apa saja yang bisa di dapatkan China dari Indonesia.

China sempat menawarkan tempat semacam pusat untuk sandar dari nelayan–nelayan yang ada di Pasifik dengan Laut Cina Selatan tetapi Indonesia menolak mentah-mentah, satu sisi mungkin untuk sandar kapal tetapi di lain sisi nanti China menaruh kapal-kapal militernya atau alat-alat yang berkaitan dengan mata–mata untuk

kepentingan China. Kalau sampai itu terjadi nanti akan adanya tarik menarik untuk kepentingan global seperti yang terjadi di semenajung Korea dan Indonesia mengantisipasi akan hal itu.

Indonesia harus punya *common ground* yang sama untuk membuat kesepakatan yang mewakili kepentingan bersama. Itu akan lebih bijak dari pada membuat musuh bersama. Ada keputusan antara *government to government*, ada yang dilakukan atas nama pemerintah. Secara internasional Indonesia masih harus bersandar pada Kementerian Luar negeri sehingga ketika Kementerian Pertahanan misalnya ingin membuat perjanjian internasional Kementerian Pertahanan harus koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk meminta masukan dan apa saja yang harus disiapkan. Dari perjanjian tersebut yang sudah disepakati dengan negara lain baru akan disahkan apabila ada *full power* (bagaimana otoritas negara ini diberikan kepada Kementerian yang bersangkutan) kemudian *full power* itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri, kemudian baru pendelegasian kepada Menteri Pertahanan. Di Kementerian Pertahanan nanti yg menandatangani *for to goverment/to the goverment/belong to goverment/ministry of goverment/menteri* atau pejabat atas nama menteri. Perjanjian yg disepakati harus ada MoU terlebih dahulu ( payungnya dulu ) Kementerian Pertahanan punya *Letter of Intense* dengan Belanda 2013 namun *DEFENCE COOPERATION AGREEMENT (DCA)* nya baru di tanda tangani pada tahun 2016. Yang paling penting adalah *achievement* nya bagaimana, kemudian methodnya dibuat apa, kemudian *ways* nya yang di pilih seperti apa. Tetapi kalau teorinya banyak *achievementnya* tidak dapat berarti bukan juga sebuah kegagalan, berarti Indonesia harus berjalan *next tap* untuk memahami mencapai hal tersebut.

Oleh sebab itu, berdasarkan penjelasan dari bab I sampai bab IV yang sudah dipaparkan tentang faktor-faktor Indonesia menyetujui adanya peningkatan kerja sama militer dengan China pasca konflik adalah karena dipengaruhi oleh politik dalam negeri Indonesia, kondisi ekonomi militer Indonesia, serta untuk mendorong secara damai terkait isu Laut China Selatan.

Alasan ekonomi akan memperkuat pertahanan. Sebuah negara bisa memperkuat pertahanan negara tersebut dengan didukung ekonomi yang baik. Banyak sinergi yang terjadi antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negeri memutuskan perjanjian-perjanjian internasional, memberikan masukan-

masuk ke Kementerian Pertahanan. (Kolonel Kav Oktaheroe Ramsi, 2017) Undang-Undang disahkan sebagai landasan agar apabila terjadi sesuatu kedua negara memiliki payung hukum yang sama. Undang-Undang No.6 tahun 2016 yang disahkan pada tanggal 30 Maret 2016 adalah Undang-Undang terusan terusan, jadi yang belum selesai di tahun-tahun sebelumnya untuk dijadikan Undang-Undang di tahun-tahun selanjutnya. (H.A. Hanafi Rais, 2017)